

Analisis Pengawasan Pimpinan Pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu

Bambang Sutikno

Department of Administration Public, STIA Bengkulu

Email: bambangstia01@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [08 Januari 2022]

Accepted [20 Januari 2022]

KEYWORDS

Pengawasan,
Perlindungan,
Tanaman,

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapatkan data, serta mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu peneliti membuat gambaran tentang keadaan secara objektif mengenai pelaksanaan Pengawasan Pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Kepala UPTD. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang informan pegawai dan 2 orang informan masyarakat. Berdasarkan aspek dan hasil penelitian maka dapat diketahui gambaran mengenai pelaksanaannya. Aspek Pertama yaitu pengetahuan pegawai UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu mengenai standar kerja masih kurang, tidak menggunakan media lain seperti spanduk atau roll baner dan lainnya. Aspek Kedua yaitu kemampuan kerja pegawai UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu dalam melayani masyarakat atau petani belum maksimal, karena masih adanya keluhan dari masyarakat atau petani bahwa pegawai UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu sering berpergian pada saat jam kerja masih berlangsung dan pada saat petani ingin melakukan pelayanan terkait budidaya tanamannya. Aspek Ketiga yaitu tindakan perbaikan yang diambil seperti sanksi melalui teguran belum mampu untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi.

ABSTRACT

This study aims to identify, collect data and describe how leadership monitoring at UPTD is carried out for the protection of food crops and plantations (PTPHP) in Bengkulu province. In this study, the researchers used qualitative analysis techniques with descriptive methods, i.e. the researchers objectively described the situation related to the performance of supervisory leadership at UPTD for Plant Protection and Cultivation Food (PTPHP) of Bengkulu Province conducted by the head of UPTD. While the data collection techniques in this study were interviews, observations and documentation. The informants for this study were 9 people, including 7 staff informants and 2 community informants. Based on the research aspects and results, one can see an overview of the performance. The first aspect is that the knowledge of UPTD PTPHP staff of Bengkulu Province about labor standards is still lacking, they do not use other means such as banners or banners and other means. The second aspect is that the working capacity of UPTD PTPHP staff in Bengkulu province to serve the community or farmers has not been maximized, due to complaints from the community or farmers that UPTD staff PTPHP of Bengkulu Province often travels on business during its work hours and when farmers want to provide services related to their culture. The third aspect is that the corrective measures taken such as punishment by reprimand have not yet been able to reduce the deviations that occur.

PENDAHULUAN

Tujuan dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak tergantung dari faktor manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Untuk memperoleh kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan perlu mengerakkan serta memantau pegawainya agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya melalui suatu pengawasan (Irfan Fahmi, 2017:138).

Banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maka pengawasan perlu dilakukan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan pimpinan kepada pegawai yang ada dalam organisasi, dibutuhkan manajemen yang baik agar pengawasan dapat berjalan dengan lancar sehingga pegawai dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Untuk mengemban tugas serta tanggung jawabnya, pimpinan sebaiknya dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas pegawai dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Dalam era otonomi daerah, pengawasan dari pimpinan masih mengalami banyak permasalahan, baik dari segi kelembagaan aparat pengawasannya yang belum dapat bekerja secara sinergis, efisien dan efektif, maupun alat-alat pengawasan lainnya berupa standar-standar sebagai dasar pelaksanaan dan sistem pengendalian internal yang belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang di tetapkan pada peraturan perundang-undangan (academia.edu, 2017). Seperti yang di temui dilapangan dapat di lihat dari beberapa fenomena sehubungan dengan pengawasan pimpinan diantaranya, pimpinan jarang menegur pegawai yang meninggalkan kantor disaat jam kerja, melainkan pimpinan hanya menanyakan berapa jumlah pegawai yang hadir perbidangnya, lalu pimpinan jarang menindak lanjuti pegawai yang telat masuk kantor dan yang jarang mengikuti apel pagi. Dengan terjadinya hal tersebut, sudah dapat membuktikan bahwa pengawasan kerja pegawai masih sangat kurang (media.neliti.com, 2017).

Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian. OPD di Povinsi Bengkulu dibentuk seiring terbitnya Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828) dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan kewenangannya Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Perlindungan Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan (PTPHP) yangwilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.Pada pasal 4 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2017, UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah kewenangan Dinas.

UPTDPerlindungan Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala UPTD. Dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2017 Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, melaksanakan pengkajian dan analisis teknis operasional di bidang pertanian sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi di bidang pertanian sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, serta melaksanakan administrasi masing-masing UPTD.

Pengawasan merupakan fungsi yang dilakukan oleh pimpinan dari tingkat tertinggi sampai terendah dengan menggunakan fungsi manajemen.Dalam hal ini, pemimpin mempunyai wewenang untuk dapat mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugas serta bertanggung jawab atas pekerjaannya sehingga terbentuk suatu kejasama antara pimpinan dan bawahannya.Dengan adanya pengawasan kerja yang dilakukan pimpinan, maka pegawai tersebut harus bisa menunjukkan kualitas dan profesionalisme kerja pegawai tersebut (Irfan Fahmi, 2017:143).

Setiap staf melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan urusannya masing-masing, karena berhasil atau tidaknya suatu tugas Kepala UPTD akan dipengaruhi oleh kemampuan pada masing-masing staf dalam menjalankan fungsinya. Sehingga, pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Irfan Fahmi, 2017:139).Dalam penyelenggaraan yang telah dilakukan UPTDPerlindungan Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu ada beberapa hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya.Hal ini, terlihat dari masih adanya keluhan dari kelompok tani/petani pada saat kelompok tani/petani ingin memberikan pengaduan tentang tanamannya.

Berdasarkan hasil pra penelitian kepada pegawai UPTDPerlindungan Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, diketahui bahwa adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai. Seperti misalnya, adanya pegawai yang keluar kantor pada saat jam kerja, padahal ada kelompok tani yang ingin memberikan pengaduan tentang tanamannya yang terkena penyakit atau hama. Hal ini, menunjukkan bahwa pegawai pada UPTDPerlindungan Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan.Maka dari itu, pengawasan pimpinanharus dilakukan, baik itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung.Hal itu dilakukan agar tujuan dari program kerja UPTDPerlindungan Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dapat tercapai serta program kerja tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Terjadinya permasalahan tersebut merupakan contoh kerja pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakhadiran pegawai sewaktu kelompok tani ataupun petani ingin memberikan pengaduan. Jika dikaitkan dengan pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, maka terlihat jelas bahwa belum adanya pengawasan pimpinan yang baik. Hal tersebut dilihat dari pegawai yang tidak ada di kantor pada saat jam kantor sedang berlangsung.

Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin kegiatan agar terlaksana sesuai dengan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar yang telah ditetapkan (Irfan Fahmi, 2017:139).

Adapun standar kerja pegawai tersebut yaitu menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT, melakukan eksplorasi agens hayati atau pestisida nabati, melakukan perlakuan di laboratorium/ rumah kaca dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK, menjadi fasilitator kelompok tani dalam pelaksanaan diskusi hasil pengamatan OPT dan/atau faktor iklim, melakukan bimbingan penerapan PHT kelompok tani, menyiapkan bahan penyusunan manual/jiklak/jiknis perlindungan/karantina tumbuhan, melakukan konsenasi agens hayati, menganalisis/mengkaji resiko OPT/OPTK dan atau agens hayati, membuat koleksi OPT/OPTK secara kompleks, memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK, melakukan pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK, melakukan perbanyak agens hayati (patogen, parasitoid, predator), melakukan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/ tindakan karantina terhadap OPT/OPTK, memandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT (varietas, jenis OPT, luas dan intensitas serangan), serta melakukan kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani.

Seorang pegawai sudah sepatutnya dan seharusnya selalu mematuhi peraturan atau ketentuan yang ada dalam organisasi. Sama halnya dengan manusia lainnya, pegawai tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kadang kala pegawai melakukan kesalahan dan tindakan menyimpang dari peraturan. Misalnya masuk kerja terlambat, pulang kantor sebelum waktunya tanpa keterangan yang jelas, meninggalkan pekerjaan sesuka hatinya, tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, keluar dari kantor tanpa izin, bahkan saat jam kantor keluyuran tanpa keperluan yang jelas diluar kantor dengan masih memakai pakaian dinas. Hal itulah yang akan menghambat pencapaian tujuan dan menimbulkan efek negatif bagi organisasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu dirasakan belum efektif. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan pimpinan terhadap pegawai belum maksimal yang ditandai dengan masih banyaknya pegawai yang tidak ada di kantor pada saat jam kerja masih berlangsung. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Disamping itu, pengawasan juga memiliki peran dalam membantu seorang pimpinan suatu organisasi dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi organisasi, dan tidak terkecuali telah menempatkan seorang pimpinan sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi (Irfan Fahmi, 2017:140-141).

LANDASAN TEORI

Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko dalam Fahmi (2017:139), pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Meskipun rencana yang mantap telah ada, sudah diatur dan digerakkan, belumlah terjamin bahwa tujuan akan tercapai secara otomatis. Disini diperlukan pula adanya pengawasan (Controlling) untuk mengawasi segala sesuatunya berjalan menurut rencana atau tidak. Pengawasan ialah mengamati kegiatan secara konstan, apakah segala aktivitas manajemen berjalan lurus atau menyimpang. Pengawasan berusaha mempertahankan agar seluruh kegiatan berjalan lurus di atas garis yang telah ditetapkan. Dan jika ditemukan penyimpangan, maka diluruskanlah sedini mungkin, supaya penyimpangan itu tidak berkepanjangan yang menimbulkan bencana yang lebih besar (Uliana, 2016).

Pengawasan menurut Hadibroto dalam Fahmi (2017:139), adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan dengan tujuan agar organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut Brantas dalam Fahmi (2017:139), pengawasan dapat

diartikan sebagai suatu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen yang sangat penting, pengawasan merupakan salah satu indikator penting yang akan menentukan terlaksananya suatu program atau kegiatan berdasarkan perencanaan. Dalam pengawasan juga terdapat suatu tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program. Output dari pengawasan adalah suatu perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.

Beberapa tujuan pengawasan kantor (Uliana 2016), adalah:

1. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinue, karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasikinerjanya
2. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerja yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan
3. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil akurat yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai
4. Mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan
5. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu proses kegiatan untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan, yang berkaitan dengan evaluasi prestasi kerja, jika perlu melakukan tindakan perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan standar atau tolok ukur yang ditetapkan sebelumnya, agar supaya prestasi kerja tercapai sesuai dengan rencana. Fungsi-fungsi fundamental manajemen tersebut juga merupakan sistem. (Uliana 2016).

Pengawasan bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi pengawasan berupaya untuk menemukan apa yang tidak benar dalam pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan pekerjaan pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu maka dalam implementasi fungsi pengawasan tersebut harus ada pedoman berupa asas atau prinsip yang dijadikan pegangan oleh pengawas dan pihak yang terkena pengawasan.

Pola Pengawasan

Teknik pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam pengawasan untuk mengetahui apakah suatu tindakan telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Pada dasarnya, Teknik pengawasan dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, yaitu:

- a. Pengawasan Langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan langsung sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
- b. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang tidak langsung dilakukan oleh pimpinan tetapi melalui perantara seperti laporan. Laporan tersebut dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pengawasan adalah suatu cara yang dipakai dalam pengawasan untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan yang ada telah sesuai dengan yang direncanakan. Dalam penelitian ini digunakan kombinasi teknik pengawasan menurut Siagian dan juga Bohari, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, serta pengawasan preventif dan pengawasan represif dalam pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat (Waskat) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Waskat merupakan proses pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan organisasi (lembaga). Oleh karena itu, waskat memiliki sifat sangat dominan dan sangat menentukan mengingat kedudukan pimpinan yang menentukan jalannya mekanisme birokrasi organisasi.

Pengertian Waskat itu sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan pengertian pengawasan secara umum, walaupun para ahli mendefinisikan waskat secara khusus. Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir (1994:72) mengemukakan pengertian Waskat sebagai proses pemantauan, pemeriksaan, evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan atau atasan organisasi kerja terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan, supaya dapat diperbaiki atau diusulkan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Tujuan Pengawasan Melekat.

Tujuan dilaksanakannya Waskat sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 yaitu terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang dilakukan oleh atasan langsung. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan". Tujuan pengawasan pula bisa dikatakan sebagai upaya membandingkan kondisi yang seharusnya dengan kondisi kenyataannya yang ada, sehingga nantinya diikuti dengan tindakan pembenaran atau pengarahan sampai akhirnya tindakan organisasi sesuai dengan apa yang seharusnya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berikut adalah tabel desain penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Desain Penelitian

No.	Desain	Uraian
1.	Pendekatan Penelitian	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
2.	Fokus Penelitian	Pengawasan Pimpinan dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD PTPHP.
3.	Aspek Penelitian	Proses Pengawasan yaitu menetapkan alat ukur/standar pengawasan, menilai hasil kerja pegawai, dan melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan kerja pegawai.
4.	Tempat Penelitian	Penelitian ini dilakukan di UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu.
5.	Teknik Pengumpulan Data	Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
6.	Teknik Pemilihan Informan	Dalam penelitian ini informan yang diteliti yaitu informan yang berkaitan langsung dengan pengawasan Pimpinan pada UPTD PTPHP yaitu Kepala UPTD, Kasubag TU, Kasi Pelayanan Teknis, Kasi Lab, Staff UPTD dan masyarakat dalam hal ini petani/kelompok tani.
7.	Teknik Analisa Data	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2019.

Pada tabel 1 diatas menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, fokus dan aspek penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan dan teknik analisa data.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni (2014:19), Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian kualitatif dimana penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa sebagaimana adanya. Sehingga, bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Fokus Penelitian

UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu adalah keseluruhan rangkaian, tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan untuk mengawasi dan mengendalikan bawahan serta organisasi atau unit organisasinya secara terus menerus demi terciptanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan tercapainya hasil atau tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan program atau rencana dan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui proses teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi secara langsung dan melakukan dokumentasi yang mendukung penelitian. Hasil yang didapat ini merupakan penjelasan yang menyajikan mengenai keterangan-keterangan yang ditemukan dilapangan selama penelitian. Data-data yang berhasil peneliti kumpulkan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang relevan mengenai pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala UPTD, Kasubag TU, Kasi Pelayanan Teknis, Kasi Laboratorium, Staf Laboratorium, serta Staf Pelayanan Teknis, dapat kita lihat terdapat perbedaan jawaban yang diberikan masing-masing pegawai. Hal ini berarti, pegawai pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum semuanya mengerti apa itu standar kerja pegawai dan apa saja standar kerja yang harus mereka lakukan selama mereka bekerja di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Publikasi standar kerja pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu masih belum optimal, karena publikasi mengenai standar kerja pegawai hanya melalui satu buku pedoman saja, tidak dibagikan kepada seluruh pegawai UPTD, dan juga tidak diketik menggunakan media lain seperti spanduk atau roll baner agar semua pegawai di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu mengetahui dan memahami standar kerja pegawai tersebut.

Pembahasan

Standar kerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan. Standar kerja tersebut harus ditetapkan dahulu sebelum melaksanakan pekerjaannya, dan bawahan harus mengetahui betul standar kerja yang digunakan atasan untuk menilai pekerjaannya. Untuk mencapai maksud yang sama yaitu bawahan dapat memahami standar yang digunakan atasannya, maka standar dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama. Dengan kata lain atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar dari hasil pekerjaan bawahan tersebut.

Terlihat bahwa beberapa pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu masih sangat kurang dalam pengetahuan mengenai standar kerja yang digunakan. Hal itu dikarenakan kurangnya publikasi mengenai standar kerja, dilihat dari buku standarkerja yang digunakan hanya dimiliki oleh satu orang pegawai UPTD PTPHP yaitu Staf Laboratorium Ibu KY. Selain itu publikasi melalui media lain seperti spanduk atau roll banner dan sebagainya juga tidak ada. Dalam hal ini pemahaman pegawai UPTD PTPHP mengenai standar kerja masih sangat kurang, sehingga mereka tidak bekerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan.

pengetahuan pegawai mengenai standar kerja masih sangat kurang karena publikasi mengenai standar kerjanya juga kurang, kemampuan pegawai dalam melayani masyarakat atau petani masih kurang karena masyarakat atau petani masih mengeluhkan adanya pegawai yang keluar kantor saat jam kerja masih berlangsung dan ini berarti dapat menghambat pelayanan terhadap masyarakat atau petani, serta tindakan perbaikan yang diambil masih sangat kurang karena hanya menegur dan membiarkan saja pegawai yang pergi saat jam kerja berlangsung, sedangkan motivasikerja seperti memberikan motor atau mobil dinas baru belum mampu meminimalisir penyimpangan yang terjadi di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pengetahuan pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu mengenai standar kerja masih kurang, karena publikasi mengenai standar kerja yang hanya dimiliki satu orang pegawai saja dan tidak menggunakan media lain seperti spanduk atau roll baner dan lainnya. Dimana, bertujuan untuk memudahkan pegawai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dalam memahami standar kerja yang harus dilakukan. penelitian pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum mampu melakukan pelayanan dengan baik. Karena masih adanya keluhan dari masyarakat atau petani bahwa pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sering berpergian pada saat jam kerja masih berlangsung dan pada saat petani ingin melakukan pelayanan terkait budidaya tanamannya yang terserang hama dan penyakit. Hal ini berarti pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura



dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum maksimal dalam menjalankan TUPOKSI yang telah ditetapkan karena berdasarkan TUPOKSI UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terkait budidaya tanaman perkebunan dengan maksud dan tujuan untuk melindungi tanaman dan produksinya dari serangan organisme pengganggu tanaman sehingga nilai kerugian dapat diminimalisirkan

Saran

Agar standar kerja seperti menggunakan spanduk atau roll banner dan lainnya agar dapat diketahui dan dimengerti oleh semua pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu hendaknya tidak berpergian keluar kantor pada saat jam kerja masih berlangsung karena dapat menghambat proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau petani. Perlu adanya sanksi tegas agar dapat meminimalisir penyimpangan, serta perlu adanya motivasi kerja yang lebih lagi agar meningkatkan kedisiplinan pegawai UPTD. Terakhir, pengawasan oleh Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu harus ditingkatkan lagi agar pegawai tidak seenaknya saja keluar kantor disaat jam kerja masih berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir, (2012). Analisis Data (Metodologi Penelitian Kualitatif). Jakarta Rajawali Pers.
- Fahmi, Irfan. (2017). Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. (2009). Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Hardiansyah, (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Jogjakarta: Gava Media.
- Manullang, M. (2004). Dasar-dasar manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Siagian, P. Sondang. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka. Baru Press.
- Yahya, Yohanes. (2006). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aryani Febria, (2012). Pengaruh pengawasan kantor terhadap kedisiplinan pegawai. <https://id.scribd.com/doc/252108331/Jurnal-Pengaruh-Pengawasan-Kantor-Terhadap-Kedisiplinan-Pegawai> . Diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.10 WIB
- Dian Pramana Putra, (2013). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD) [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/e%20JURNAL%20PENGAWASAN%20BPD%20DALAM%20PENGELOLAAN%20ADD%20\(11-14-13-11-37-36\).doc](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/e%20JURNAL%20PENGAWASAN%20BPD%20DALAM%20PENGELOLAAN%20ADD%20(11-14-13-11-37-36).doc). Diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.30 WIB.
- Uliana Ria Sembiring, (2016). Sistem pengawasan pemerintahan daerah. <https://anzdoc.com/teknofisiensi-jurnal-ilmiah-kopri-kopertis-wilayah-iv-vol.html>. Diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.45 WIB.